

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor pertanian terdiri dari berbagai subsektor yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian penduduk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat PDRB daerah tersebut, sebab PDRB dapat menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian suatu daerah (Maranata *et al.*, 2019). Sektor pertanian memberikan distribusi PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) paling besar di Provinsi Jambi menurut lapangan usaha dibandingkan sektor lainnya.

Grafik 1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi Sektor Pertanian Periode Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : BPS, 2022

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Semakin meningkat kontribusi sektor pertanian terhadap

pembentukan PDRB, semakin meningkat pula PDRB sektor pertanian. Begitu pula sebaliknya, semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, maka semakin menurun PDRB sektor pertanian.

PDRB sebagai salah satu indikator penting dalam potensi ekonomi disuatu wilayah tentunya mempunyai hubungan dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap sektor perekonomian atau lapangan pekerjaan memiliki daya serap tenaga kerja dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda (Rompas *et al.*, 2015). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan proses produksi. Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Ziyadaturrofiqoh *et al.*, 2018).

Grafik 2. Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Periode 2017-2021 (jiwa)



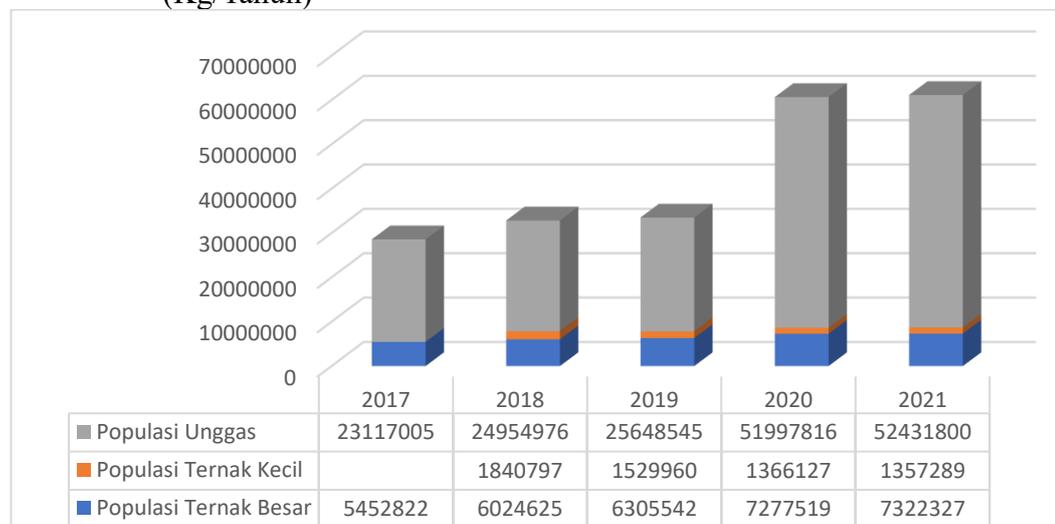
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan

jasa. Hal ini menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Provinsi Jambi dan sektor pertanian memberikan alternatif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan wilayah (Baso dan Nurul, 2022).

Salah satu subsektor yang penting untuk dikembangkan dari sektor pertanian yaitu peternakan. Subsektor peternakan telah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan pertanian karena peternakan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan salah satunya sumber hewani. Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional (BPS, 2020).

Grafik 3. Produksi Daging Ternak Provinsi Jambi Periode Tahun 2017-2021 (Kg/Tahun)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi (2022)

Produksi daging yang dihitung merupakan produksi daging lokal dari berbagai jenis ternak baik ternak besar maupun unggas. Jenis ternak besar adalah babi, domba, kambing, kerbau, dan sapi. Sedangkan jenis unggas adalah ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik. Berdasarkan grafik 2, Produksi daging ternak besar naik pada tiap tahunnya, dimana ternak besar tersebut terdiri dari ternak sapi, kuda dan kerbau. Pada tahun 2017 sebanyak 5.452.822 Kg, pada

tahun 2018 menjadi 6.024.625 Kg, pada tahun 2019 sebanyak 6.305.542 Kg, pada tahun 2020 sebanyak 7.277.519 Kg, dan pada tahun 2021 sebanyak 7.322.327 Kg. Ternak kecil terdiri dari ternak kambing, domba dan babi. Produksi dagingnya turun tiap tahunnya, pada tahun 2017 kosong dikarenakan tidak ada catatan data pada tahun tersebut, pada tahun 2018 produksinya sebanyak 1.840.797 Kg, pada tahun 2019 sebanyak 1.529.960 Kg, pada tahun 2020 sebanyak 1.366.127 Kg, dan pada tahun 2021 menjadi 1.357.289 Kg.

Ternak unggas menjadi ternak yang memiliki populasi paling tinggi dibanding ternak lainnya, yaitu terdiri dari itik, ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur. Dari seluruh ternak unggas, populasi yang paling banyak adalah ayam kampung. Pada tahun 2017 produksi daging unggas sebanyak 23.117.005 Kg, pada tahun 2018 naik menjadi 24.954.976 Kg, pada tahun 2019 sebanyak 25.648.545 Kg, pada tahun 2020 produksi naik secara drastis, yaitu menjadi 51.997.816 Kg, dan pada tahun 2021 naik menjadi 52.431.800 Kg. Peningkatan jumlah produksi dan populasi unggas didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan ternak dari pemerintah (Bappeda, 2015).

Peningkatan produksi ternak akan membuat peternak tetap mempertahankan usahanya. Nilai dan harga jual ternak tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, ekonomi peternak akan meningkat. Demikian peternak dapat mengendalikan harga pasar, bila dibandingkan dengan peternak komoditas lain, yang hanya sebagai penerima harga (*price taker*) (Maesya dan Supardi, 2018). Setiap peternak pada dasarnya selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien (Ngurah *et al.*, 2018). Peningkatan harga jual ternak mengakibatkan penerimaan peternak menjadi meningkat dan pendapatan yang diterima akan lebih besar (Nitha *et al.*, 2016). Besarnya surplus pendapatan subsektor peternakan dipengaruhi oleh pola permintaan nilai semua wilayah provinsi dan sistem perekonomian tertutup (Yulia *et al.*, 2015).

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan peternak yaitu menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Indikator kesejahteraan petani salah satunya adalah perkembangan pendapatan riil petani. Dalam

meningkatkan pendapatan riil petani sangat dipengaruhi oleh sarana produksi yang digunakan oleh petani dalam kegiatan pertanian mereka (Kresna dan Ida, 2016). NTUP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persentase, dimana pada penghitungan NTUP hanya menggunakan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebagai komponen Ib (BPS, 2016).

Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh peternak (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh peternak untuk produksi peternakannya (Ib) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan peternak dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan peternak. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas). NTUP > 100 : peternak mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar. NTUP = 100 : peternak tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh peternak sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh peternak untuk produksinya terhadap tahun dasar. NTUP < 100 : peternak mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi pada tahun 2021, nilai NTUP pada bulan Januari yaitu 100.81% yang berarti harga yang diterima peternak sama dengan harga yang dibayar peternak. Pada bulan Februari terjadi penurunan dimana NTUP menjadi 99.42% ini membuktikan bahwa peternak mengalami kerugian. Kerugian juga terjadi pada bulan Maret walaupun nilainya naik menjadi 99.89%,

namun pada bulan April menunjukkan bahwa peternak mengalami surplus yaitu 101.87%. Pada bulan Mei juga mengalami kenaikan yaitu 103.39% berarti peternak masih mengalami surplus, bulan Juni peternak masih surplus walaupun turun sedikit menjadi 103.13%. Kemudian turun kembali pada bulan Juli menjadi 102.72%, pada bulan Agustus peternak tidak mengalami keuntungan/kerugian yaitu 100.92%, demikian juga pada bulan September yaitu 100.94%. Nilai NTUP yang paling rendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 98.95%, naik kembali pada bulan November menjadi 99.23% dan pada akhir tahun 2021 yaitu bulan Desember sebesar 99.71%. Rata-rata nilai NTUP pada tahun 2021 yaitu 100.39%, ini menunjukkan harga yang diterima oleh peternak sama dengan harga yang dibayar oleh peternak.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Nilai Tukar Usaha Pertanian Subsektor Peternakan Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2022”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan nilai tukar usaha pertanian subsektor peternakan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022?
2. Bagaimana pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen nilai tukar usaha pertanian pada subsektor peternakan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022?

1.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai tukar usaha pertanian subsektor peternakan di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2022 mengalami peningkatan.
2. Nilai tukar usaha pertanian subsektor peternakan di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2022 dipengaruhi oleh inflasi dan indeks harga konsumen.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan nilai tukar usaha pertanian subsektor peternakan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen nilai tukar usaha pertanian pada subsektor peternakan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai nilai tukar usaha pertanian di Provinsi Jambi.
2. Bagi pemerintah dan peternak, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa komoditas/produk peternakan.